

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI, BELANJA
PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB DI PROVINSI
RIAU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



OLEH :

MIRAWATI
NPM : 165110504

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MIRAWATI
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SIMPANG-BENAR, 27 JULI 1997
NPM : 165110504
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI, BELANJA PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB DI PROVINSI RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil karya orang lain (**bukan plagiat/duplikasi**) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah. Demikian pernyataan ini tidak benar saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan



(MIRAWATI)

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI, BELANJA PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB DI PROVINSI RIAU

OLEH :

MIRAWATI
NPM : 165110504

(Dibawah Bimbingan : Dr. Hj. Ellyan Satraningsih S.E, M.Si)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Dimana tingkat PDRB dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh dari tingkat investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan data rentang waktu 10 tahun mulai dari 2009 sampai 2018. Berdasarkan hasil penelitian maka didapat hasil, investasi PMA dan PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau. Sedangkan belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Riau. Dan tenaga kerja tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau.

Kata Kunci : PDRB, Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah, Dan Tenaga Kerja

ABSTRACT

Analysis Of The Effect Of Invesment Levels, Government Expenditure And
Labour On The GDP Of Riau

BY :

MIRAWATI
NPM : 165110504

(Dibawah Bimbingan : Dr. Hj. Ellyan Satraningsih S.E, M.Si)

GDP is defined as the total value added generated by unit of the work in a region or is the total value of final goods and services produced by all economic units in a region. Floor where can GDP growth reflects a region economically. High rate of economic growth as shown by the high value of GDP show that area experienced improvement in the economy. The purpose of this study was to see how big the influence of prudential floor, goverment expenditure and labor against GDP of Riau.

The research method using multiple regression analysis using data from 10 years span of the time from 2009 to 2018. Based on the result of the research could result in domestic investment and FDI investment is positive and significant GDP effect on the Riau. While goverment expenditure has no effect on GDP of Riau.

Keyword : GDP, Invesment Levels, Goverment Expenditure and Labour



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang menciptakan manusia dengan kelebihan akal untuk berpikir terhadap alam dan lingkungannya serta dengan perantara kalam, berkat inayah dan petunjuk serta kerja keras dan kesungguhan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah, Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Riau” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan proposal ini guna melengkapi salah satu syarat penyelesaian skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Akan tetapi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis serta menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habbina wanabiyyana Muhammad SAW tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan mudah-mudahan syafaatnya kepada kita semua, Amiin...

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya berkat bimbingan, pengaruh serta motivasi yang telah diberikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Disamping bantuan lain dari berbagai pihak yang juga sangat bermakna.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak ada kata yang lebih banyak kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam dari penulis kepada:

1. Bapak Dr. Firdaus AR, SE, M.Si. Ak, Ca, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr.Hj.Ellyan Sastraningsih, S.E, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan sebagai pembimbing penulis.
3. Bapak Drs. M. Nur MM selaku Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu beserta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khususnya pada Jurusan Ekonomi Pembangunan.
6. Khususnya penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua bapak (Sakir Asmara) dan mamak (Sulasmi) yang telah memberikan semangat serta dorongan untuk kesuksesan dalam bangku pendidikan.
7. Orang yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis yaitu : Rina Sutiawati A.Md.Keb (kakak), Yetno (abang) dan Zamal Mirdani serta Nur Hidayah (adik kandung).
8. Orang yang telah banyak memberikan motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis yaitu : Dia Dwi Lestari, Afina, Fitri Nuraisyah, Yuliana

S.ip, Mella Asfiana S.pd, Sinta Ayu Pratiwi, Valetta Andini Putri, serta teman-teman lainnya.

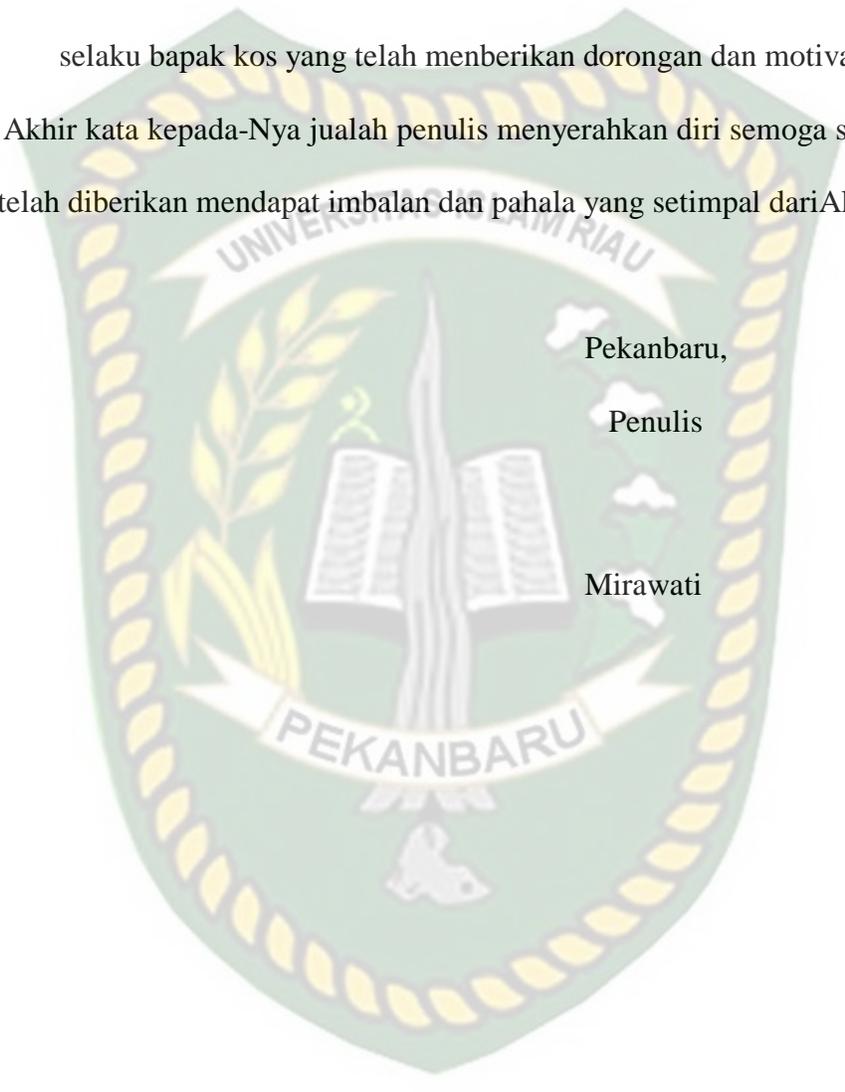
9. Penulis juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mujito selaku bapak kos yang telah memberikan dorongan dan motivasi.

Akhir kata kepada-Nya jualah penulis menyerahkan diri semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Pekanbaru,

Penulis

Mirawati



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 : Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 : Rumusan Masalah	11
1.3 : Tujuan Penelitian	11
1.4 : Manfaat Penelitian.....	12
1.5 : Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 : Telaah Pustaka.....	14
2.1.1 : Pengertian Pertumbuhan & Pembangunan Ekonomi	14
2.1.2 : Model Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	16
2.1.3 : Tingkat Investasi Dan PDRB	21
2.1.4 : Belanja Pemerintah Dan PDRB.....	26
2.1.5 : Tenaga Kerja Terhadap PDRB	28
2.2 : Penelitian Terdahulu.....	30

2.3 : Kerangka Pikir.....	32
2.4 : Hipotesis.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1: Lokasi Penelitian.....	34
3.2 : Jenis Dan Sumber Data.....	34
3.3 : Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 : Definisi Variabel Penelitian.....	35
3.5 : Metode Analisis Data.....	37
BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1 : Keadaan Geografis Provinsi Riau.....	43
4.1.1 : Keadaan Alam.....	43
4.1.2 : Iklim dan Curah Hujan.....	47
4.2 : Pemerintahan.....	47
4.3 : Penduduk.....	50
4.4 : Pertumbuhan Ekonomi.....	51
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 : Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Riau.....	53
5.1.1 : Tingkat Investasi.....	53
5.1.2 : Belanja Pemerintah.....	56
5.1.3 : Tenaga Kerja.....	57
5.1.4 : PDRB Di Provinsi Riau.....	58

5.2 : Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Riau.....	59
5.2.1 : Interpretasi Hasil.....	61
5.3 : Uji Statistik.....	62
5.4 : Uji Asumsi Klasik.....	64
5.5 : Pembahasan.....	67
5.5.1 : Tingkat Investasi Terhadap PDRB.....	67
5.5.2 : Belanja Pemerintah Terhadap PDRB.....	68
5.5.3 : Tenaga Kerja Terhadap PDRB.....	69
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 : Kesimpulan.....	70
6.2 : Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018.....	5
Tabel 1.2 :	Perkembangan Nilai Realisasi PMA Provinsi Riau Tahun 2009-2018.....	7
Tabel 1.3 :	Perkembangan Nilai Realisasi PMDN Provinsi Riau Tahun 2009-2018.....	8
Tabel 1.3 :	Jumlah Belanja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2009-2018.....	10
Tabel 2.1 :	Daftar Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 :	Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2017.....	48
Tabel 4.2 :	Jumlah Penduduk Provinsi Riau Tahun 2009-2018	49
Tabel 4.3 :	PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018.....	51
Tabel 5.1 :	Perkembangan Nilai Realisasi PMDN Provinsi Riau Tahun 2009-2018.....	53
Tabel 5.2 :	Perkembangan Nilai Realisasi PMA Provinsi Riau Tahun 2009-2018.....	54
Tabel 5.3 :	Jumlah Belanja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2009-2018.....	55
Tabel 5.4 :	Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Di Provinsi Riau Tahun 2009-2018.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pada hakikatnya yaitu suatu sistem multidimensi yang mencakup suatu transisi struktur sosial, transisi pada pandangan hidup masyarakat serta transisi pada kelembagaan nasional. Pertumbuhan juga mencakup transisi pada kualitas peningkatan ekonomi, serta pembasmian kemiskinan. Dalam mencapai suatu tujuan yang diperlukan, maka pembangunan suatu Negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui kemajuan pembangunan pada negaranya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu penjelasan yang mencakup pengaruh pada strategi pemerintah yang dilakukan pada bidang ekonomi. Menurut Boediono (2013), pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dengan demikian, suatu perekonomian dinyatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pendapatan riil pada tahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam menaikkan tingkat hidup suatu negara dapat diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 2002).

Tujuan pembangunan nasional merupakan menaikan suatu hasil kerja perekonomian agar dapat menghasilkan suatu lapangan pekerjaan dan dapat memberikan kehidupan yang layak sebagaimana tujuan awal didirikannya Negara tersebut yaitu untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, usaha pemberantasan kemiskinan harus dilaksanakan secara komprehensif, meliputi berbagai sudut pandang kehidupan serta dilakukan secara berkepanjangan. Perencanaan yaitu suatu usaha yang dilakukan dalam mencegah ketidakseimbangan terjadi yang sifatnya akumulatif. Maksudnya, perubahan terjadi dalam keseimbangan awal yang bisa mengakibatkan suatu perubahan dalam proses sosial dan kemudian akan membawa kesistem yang ada untuk menjauhi keseimbangan semula.

Menurut Erly Suandy (2001) perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Perencanaan mempunyai suatu fungsi fundamental pada suatu sistem pembangunan. Salah satu dari fungsi perencanaan yaitu suatu arahan dalam sistem pembangunan yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan. disamping itu juga selaku tolak ukur keberhasilan dalam sistem pembangunan yang dilaksanakan. Sementara itu pembangunan itu sendiri bisa dimaknai pula suatu usaha yang dilaksanakan dalam menaikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat domestik (Pantjar Simatupang Dan Saktyanu K, 2003 dan Ravi, 2010).

Jadi sasaran dari pembangunan ekonomi selain dalam menaikan pendapatan dalam negeri rill juga dalam menaikan kesempatan kerja dengan menambah pada

bidang kerja yang bisa banyak menyerap tenaga kerja. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian proses untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu Negara. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi suatu Negara untuk menghindari kesenjangan sosial penduduknya yang juga tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat memberikan pada masyarakat potensi yang lebih besar dalam menguasai alam yang ada disekitarnya serta meningkatkan kualitas kebebasannya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pembangunan ekonomi memiliki empat sifat penting yaitu: 1). sebuah sistem maksudnya yaitu suatu transisi yang terjadi secara berkelanjutan. 2). suatu upaya dalam menaikkan pendapatan perkapita atau. 3). kenaikan pendapatan perkapita secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pengesahan UU No 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kekuasaan pemerintah setempat dalam memerintah serta melaksanakan pekerjaan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional Negara Republik Indonesia serta pengesahan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah, diinginkan dapat memberikan motivasi kenaikan kreatifitas serta inisiatif dalam menelusuri serta memajukan kapasitas yang ada pada setiap daerah serta dilakukan dengan cara teratur, sepadan serta terarah supaya pembangunan disetiap daerah bisa betul-betul sesuai dengan prioritas serta potensi wilayah (Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007). Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi

berarti barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat mengalami perkembangan kegiatan dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2010).

Pada Negara berkembang termasuk negara Indonesia, lajunya arus modal memiliki peluang yang sangat baik untuk menghasilkan pembiayaan pembangunan ekonomi. Yang mana pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang merupakan upaya terus-menerus yang diinginkan bisa mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945, sehingga bisa memperoleh tujuan tersebut, maka pembangunan nasional difokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, untuk kebutuhan dana pembangunan ekonomi itu sangatlah besar. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara investasi. Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam perusahaan atau proyek tertentu. Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagai suatu indeks keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang bisa menjadi tolak ukur secara makro yaitu pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, pembangunan pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum serta belum menggambarkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan wilayah dapat membawa pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan PDRB dalam suatu daerah (Suryono, 2010).

Tabel 1.1 : PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	366.939,61	2,97
2010	388.578,96	4,21
2011	410.215,84	5,57
2012	425.626,00	3,76
2013	436.187,51	2,48
2014	447.986,78	2,71
2015	448.991,96	0,22
2016	458.769,34	2,18
2017	471.081,71	2,68
2018	482,087.22	2,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB Provinsi Riau dalam milyar rupiah mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan karena kenaikan pengeluaran pemerintah Provinsi Riau yang secara bertahap telah mengalami kenaikan yang positif.

Dilihat pada sumber daya yang ada di Riau, Riau memiliki kemungkinan yang sangat besar dalam aktifitas penanaman modal khususnya pada Penanaman Modal Asing (PMA) sebab dengan banyaknya ketersediaan berbagai bahan baku dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan dan juga potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai suatu objek wisata sehingga potensi yang ada didaerah ini diberdayakan maka sangat besarlah benefitnya dalam memperoleh dana suatu Negara serta dapat pula menunjang terbentuknya suatu aktivitas ekonomi yang ada disekitar wilayah itu yang bisa menaikkan suatu penghasilan masyarakat setempat.

Menurut Salim dan Budi (2008) penanaman modal asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain atau

pemindahan modal. Tujuan pemindahan modal ini digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian. Disamping itu selain penanaman modal asing (PMA) Provinsi Riau juga memiliki investasi PMDN nya yang begitu sangat besar. Yang mana PMDN merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Disatu pihak ia mencerminkan permintaan efektif dilain pihak ia menciptakan efesiensi produktif bagi produksi dimasa depan. PMDN merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri atau pemerintah Negeri yang melakukan Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Tabel 1.2 : Perkembangan Nilai Realisasi PMA Provinsi Riau Tahun 2009-2018 (Juta US\$)

Tahun	Penanaman Modal Asing (PMA)
2009	651,60
2010	1.066,60
2011	512,30
2012	1.152,90
2013	1.304,90
2014	1.369,50
2015	753,40
2016	869,10
2017	1.061,10
2018	1.022,80

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Berdasarkan pada tabel 1.2 bisa dilihat bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Riau dalam Juta US\$ mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan karena nilai tukar USD yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan USD di pasar global.

Tabel 1.3 : Perkembangan Nilai Realisasi PMDN Provinsi Riau Tahun 2009-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Penanaman modal dalam negeri (PMDN)
2009	3.386,00
2010	1.037,10
2011	7.462,60
2012	5.450,40
2013	4.874,30
2014	7.707,60
2015	9.943,00
2016	6.613,70
2017	10.829,80
2018	9.056,40

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Berdasarkan pada tabel 1.3 bisa dilihat bahwa PMDN Provinsi Riau tahun 2009-2018 dalam Milyar Rupiah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009-2010 PMDN Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 2.348,90 milyar rupiah. Pada tahun 2011 PMDN Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 7.462,60 milyar rupiah. Pada tahun 2012-2013 PMDN Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 576,10 milyar rupiah. Pada tahun 2014-2015 PMDN Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 2.235,40 milyar rupiah. Pada tahun 2016 PMDN Provinsi Riau mengalami penurunan kembali sebesar 6.613,70 milyar rupiah. Dan pada tahun 2017 PMDN

Provinsi Riau mengalami peningkatan kembali sebesar 10.829,80 milyar rupiah dan ditahun 2018 PMDN Provinsi Riau kembali mengalami penurunan.

Untuk menciptakan ekonomi yang dapat berkembang di Riau maka pembangunan ekonomi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Riau harus bisa menggunakan seluruh dana yang ada dalam pembangunan ekonomi. Menurut Irawan (2002) pembangunan ekonomi adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup Negara yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Dalam hal itu pembangunan daerah Riau diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sesuai dengan kemampuan wilayah tersebut dalam menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja merupakan jumlah seluruh penduduk pada suatu Negara dalam memproduksi barang serta jasa ketika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, serta ketika mereka mau ikut serta pada kegiatan tersebut. Tenaga kerja merupakan suatu penduduk pada umur kerja berkisar 15 -64 (Suparmoko, 2002). Untuk menggerakkan dan memajukan pendapatan daerah, pemerintah Riau berkewajiban untuk menggunakan dana yang ada yang sumber dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) dengan semaksimal serta seefisien mungkin. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu belanja modal daerah yang kegunaanya melebihi dari satu tahun anggaran serta dapat menambah asset atau kekayaan daerah serta dapat menambah pengeluaran yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok pengeluaran administrasi umum.

Tabel 1.4 : Jumlah Belanja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2009-2018 (Juta Rupiah)

Tahun	Belanja Pemerintah
2009	3.116.774
2010	5.305.987
2011	4.538.187
2012	5.425.711
2013	6.232.409
2014	5.170.603
2015	9.627.234
2016	10.972.074
2017	12.247.194
2018	10.326.452

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Pengeluaran Pemerintah dari tahun 2009-2014 pengeluaran pemerintah mengalami fluktuasi. Sedangkan pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan secara terus menerus. Untuk meningkatkan income di daerah Riau sangat diperlukan peran sektor swasta serta meningkat partisipasi sumber daya manusia lokal sebagai modal dalam membangun wilayah tersebut. Sebagai acuan perencanaan untuk meningkatkan pembangunan di Riau pemerintah memakai teknik pembangunan dari bawah ke atas agar pembangunan ekonomi pada wilayah tersebut dapat berkelanjutan serta sesuai dengan harapan kita semua.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu aktivitas pembangunan pada perekonomian yang mengakibatkan barang serta jasa yang diproduksi masyarakat meningkat serta kemakmuran masyarakat juga meningkat. Dengan demikian, dalam memperoleh suatu kualitas perekonomian yang tinggi tidak sangat mudah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dengan berbagai faktor pendukung seperti sumber daya alam yang tersedia, stabilitas nasional, pengeluaran pemerintah yang tercantum pada APBD serta sumber daya manusia yang bermutu.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : “ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI, BELANJA PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB DI RIAU TAHUN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dijelaskan masalah yang ingin disampaikan, yaitu :

“Berapa besar pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB di Riau”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusahan masalah diatas maka dapat dipaparkan tujuan penelitian yaitu :

“Untuk menganalisis berapa pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB Riau”.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak antara lain yaitu :

1. Memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menyusun arah atau kebijakan atau yang berhubungan dengan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Riau sehingga dapat digunakan sebagai program pembangunan yang lebih baik.

2. Menjadi tambahan referensi, bahan, pedoman dan juga sebagai penyempurnaan penelitian ilmiah bagi peneliti berikutnya yang menyangkut penelitian yang sama.
3. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan pada Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tersebut agar pembahasan ini dapat dibahas lebih rinci dan sistematika maka penulis membaginya ke dalam enam bab, dimana masing-masing yang semuanya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Dengan kerangka tulisan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab tersebut dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESA

Dalam bab tersebut dikemukakan tentang teori pendukung mengenai masalah yang akan dibahas yang telah diterangkan dalam telaah pustaka dan mengemukakan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang berkaitan dengan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum yang berkaitan dengan keadaan geografis, letak, iklim, kependudukan dan gambaran umum pertumbuhan ekonomi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan penyajian penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis sebagai sumbangan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan dengan adanya penambahan penduduk disuatu Negara maka tingkat ekonomi mengalami perubahan (Adam Smith). Pertumbuhan ekonomi berarti barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat mengalami perkembangan kegiatan dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2010). Menurut Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan suatu kapasitas dalam jangka panjang disuatu Negara yang bersangkutan dalam menyediakan barang-barang ekonomi untuk penduduknya. Menurut Untoro (dalam Purnamasari, 2010) mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan suatu kegiatan di dalam perekonomian yang dapat mengakibatkan barang-barang dan jasa yang diproduksi bertambah serta kemakmuran masyarakat pun meningkat dalam jangka panjang.

Terdapat 4 aspek yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. 1). Tenaga kerja artinya suatu keberhasilan ekonomi dilihat dari kualitas input tenaga kerjanya, atau SDM nya. Hampir semua aspek produksi yang lainnya seperti : barang modal, bahan mentah dan teknologi, dapat dibeli atau dipinjam dari Negara lain. Tetapi dalam penerapan teknik produktivitas yang tinggi atas keadaan lokal hampir semua menuntut tersedianya manajemen, keterampilan produksi, serta keahlian yang hanya dapat dihasilkan dari angkatan kerja terampil yang terdidik. 2). sumber daya alam

dengan faktor produksinya yaitu tanah. Faktor yang paling berharga adalah tanah yang dapat ditanami. Selain tanah, sumber daya alam yang sangat penting adalah : migas, hutan, air serta bahan mineral lainnya. 3). akumulasi modal. Dalam akumulasi modal, dibutuhkan pengorbanan yang berupa pengurangan konsumsi, yang akan terlaksana selama beberapa puluh tahunan. Akumulasi modal serta investasi ini sangat diperlukan untuk kemajuan dalam ibidang ekonomi. 4). transfigurasi teknologi serta inovasi. Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi ialah memicu semangat kewiraswastawan. Suatu perekonomian akan sulit maju apabila tidak mempunyai para wiraswastawan yang siap menanggung resiko upaya dalam membangun pabrik produksi, mengaplikasikan teknologi baru, menghadapi berbagai macam kendala usaha, hingga mengimpor berbagai cara serta teknik usaha yang lebih maju.

Ada kecenderungan atau bisa dilihat sebagai hipotesa bahwa semakin cepat pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun maka semakin cepat pula perubahan struktur ekonomi, dengan anggapan yaitu aspek-aspek penentu lain mendukung sistem tersebut, seperti Sumber Daya Manusia, bahan baku serta teknologi tersedia (Tambunan, 2001). Kata pertumbuhan ekonomi menjelaskan atau mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian, sedangkan pada analisa makro ekonomi tingkat pertumbuhan yang diperoleh suatu Negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil suatu Negara.

2.1.2 Model Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan output perkapita pada jangka panjang. Menekankan dalam tiga faktor, yaitu : proses, output perkapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan “proses”, bukan gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan wilayah serta pembangunan sektoral harus dilakukan secara seimbang, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung pada suatu daerah, betul-betul dengan kapasitas serta prioritas daerah tersebut. Pada seluruh pembangunan, wilayah juga betul-betul merupakan suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan dalam mencapai tujuan nasional.

Dalam mengatasi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar agar tidak semakin meluas maka diperlukan pembangunan daerah, tujuan dari pembangunan yang sedang berlangsung meliputi tujuan seperti : 1). upaya pemerataan pembangunan diseluruh wilayah, serta dalam menghindari terjadinya jurang perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah yang semakin dalam. 2). suatu pengarahan pada aktivitas pembangunan wilayah sesuai dengan kemampuan aspirasi serta potensi yang ada diwilayah tersebut, baik bagi kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan wilayah itu sendiri. 3). mengembangkan hubungan ekonomi antar wilayah yang saling member keuntungan agar terjalin ikatan (ekonomi) yang kuat dalam satu kesatuan ekonomi nasional yang kokoh. 4). dilaksanakan pembinaan wilayah yang minus, wilayah perbatasan, serta tanah kritis, dengan program khusus.

Yang paling penting dalam menganalisa pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertumbuhan ekonominya. “pertumbuhan” tidak identik dengan “pembangunan”. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat yang sangat digunakan pada sistem pembangunan. Adapun tiga tujuan penting dalam pembangunan daerah, yakni memperoleh pertumbuhan, pemerataan, serta berkelanjutan. Adapun tujuan pembangunan yaitu: 1). dalam pertumbuhan ditetapkan sampai mana kelangkaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan serta sumber daya alam bisa dimanfaatkan dan dialokasikan secara maksimal dalam meningkatkan suatu aktivitas produktif. Usaha dalam kemampuan sumber daya manusia serta memanfaatkan sumber daya alam dengan ketersediaannya SDA dan sumber daya buatan teknologi dalam meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat keterampilan tenaga kerja, maka semakin besar dalam menggunakan sumber daya alam yang berguna dalam memperoleh perkembangan. 2). pemerataan yang mempunyai keterkaitan. 3). sumber daya tidak boleh hanya fokus disatu daerah saja sehingga dapat diperoleh manfaat dari pertumbuhan yang bisa dinikmati semua pihak.

Pertumbuhan ekonomi pada wilayah itu bisa berlangsung sebagai dampak dari penentu endogen dan eksogen. Diperlukan dalam memaparkan penentuan internasional dari pertumbuhan regional yaitu melalui pemanfaatan model ekonomi makro. Model tersebut berorientasi dari segi penawaran serta memaparkan output menurut faktor regional tertentu yang bisa dianalisis secara individu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut badan pusat statistik dapat diartikan suatu jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha pada

suatu daerah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang serta jasa akhir yang diperoleh dari seluruh unit ekonomi suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mendeskriptifkan nilai tambah barang serta jasa yang dapat dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat digunakan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (Sadono Sukirno, 2005). Menurut BPS besarnya struktur ekonomi serta peran sektor ekonomi dapat ditunjukkan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Ada tiga macam pendekatan dalam menghitung angka PDRB yang dapat digunakan dalam penelitian. 1). dari sisi pendapatan. suatu nilai tambah pada setiap aktivitas ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, seperti upah, surplus usaha, serta pajak tidak langsung neto. Dalam sektor pemerintahan pada upaya yang bersifat tidak mencari profit, keuntungan usaha tidak dihitung. Keuntungan usaha mencakup bunga yang dibayarkan neto, serta sewa tanah. Teknik yang seperti ini banyak digunakan dalam sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara dengan harga pasar, contohnya pada sektor pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya metode yang akurat serta kurang lengkapnya data yang bisa digunakan untuk mengukur nilai produksi serta biaya antara pada aktivitas jasa biaya (Robinson Tarigan, 2005). 2). dari sisi pengeluaran. Dalam sisi pengeluaran ini dapat dilakukan dengan cara menjumlah nilai pengguna akhir pada barang serta jasa yang diproduksi dalam negeri. Apabila ditinjau pada sisi penggunaan maka total penyediaan barang serta jasa dapat dipakai

pada konsumsi rumah tangga, lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, serta akumulasi modal. 3). dari sisi produksi. Pendekatan produksi ini dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah dari barang serta jasa yang diproduksi pada suatu aktivitas ekonomi wilayah dikurangi oleh biaya antara masing total produksi bruto setiap aktivitas subsektor pada dalam jangka waktu tertentu.

Ada dua macam cara penyajian PDRB yaitu: *pertama*, PDRB atas dasar harga konstan. Menurut BPS definisi PDRB yaitu jumlah nilai produksi atau belanja atau penghasilan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan tersebut menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya. *Kedua*, PDRB atas dasar harga berlaku. Menurut BPS yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah. Yang dimaksud dengan nilai tambah yakni nilai yang ditambahkan pada barang serta jasa yang digunakan oleh unit produksi pada sistem produksi sebagai input. Nilai tambah tersebut sama dengan balas jasa atas ikut sertanya dalam proses produksi.

Adapun manfaat perhitungan nilai PDRB yakni : mengetahui serta mengkaji suatu susunan perekonomian. Dalam perhitungan PDRB bisa dilihat apakah suatu wilayah tersebut termasuk wilayah industri, pertanian dan jasa serta seberapa besar sumbangan individu sektornya seta menyesuaikan suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, nilai PDRB dicatat setiap tahunnya, maka akan didapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan bisa memperoleh keterangan

peningkatan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

2.1.3 Tingkat Investasi Dan PDRB

Menurut Sukirno (2004), penanaman modal diartikan suatu pengeluaran pada membeli barang modal serta peralatan produksi bertujuan untuk menggantikan serta menambahkan barang modal dalam perekonomian yang akan dipakai dalam memproduksi barang serta jasa untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi ini, penanaman modal merupakan suatu aktivitas pembelanjaan agar dapat manaikan muatan suatu produksi dalam perekonomian. Secara umum penanaman modal mencakup peningkatan suatu barang serta jasa dalam masyarakat seperti peningkatan teknologi baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan lain-lainnya. Penanaman modal tidak hanya dalam memaksimalkan output saja akan tetapi dalam menentukan penyaluran sumber daya manusia serta penyaluran penghasilan, pertumbuhan serta mutu penduduk dan teknologi. Sedangkan, Fisher mengemukakan yaitu penanaman modal merupakan suatu permintaan barang serta jasa dalam menghasilkan atau menaikan suatu kapasitas produksi atau penghasilan dimasa yang akan datang.

Investasi merupakan suatu belanja oleh sektor produsen (swasta) dalam membeli barang serta jasa untuk menambah stok yang dipergunakan atau sebagai perluasan pabrik (Boediono, 2001).

Ada tiga syarat umum untuk pembangunan ekonomi pada Negara yaitu 1). akumulasi modal. Pada hal tersebut yang termasuk akumulasi baru seperti bentuk tanah, peralatan fisik serta tenaga kerja. 2). Pertumbuhan penduduknya yang didampingi dengan pertumbuhan sumber daya manusia serta keterampilannya. 3). kemajuan teknologi. pembentukan modal dapat berhasil ketika beberapa bagian atau proporsi penghasilan yang ada disimpan serta diinvestasikan untuk memperbesar suatu produk (output) serta penghasilan dimasa yang akan datang. Untuk pembangunan ini seyogyanya mengalihkan pada sumber-sumber dari arus konsumsi serta kemudian mengalihkannya sebagai investasi dalam bentuk “ capital formation” dalam mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Penanaman modal dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan kemampuan suatu tenaga kerja, sehingga menjadi tenaga kerja ahli yang terampil serta dapat memperlancar suatu aktivitas produktif.

Menurut Sukirno (2000) suatu aktivitas penanaman modal dapat memungkinkan masyarakat terus menerus meningkatkan aktivitas ekonomi serta kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasionalnya serta dapat pula meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Peranan tersebut bersumberkan dari tiga fungsi penting dari suatu aktivitas penanaman modal, penanaman modal adalah suatu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga peningkatan investasi dapat meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional dan kesempatan kerja adapun pertambahan barang sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Suryana (2000) berpendapat bahwa kekurangan modal pada suatu Negara berkembang dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, kecilnya suatu jumlah mutlak kapital material. *Kedua*, keterbatasannya kapasitas serta keahlian penduduk. *Ketiga*, rendahnya investasi netto. Dampak dari keterbatasannya tersebut, negara-negara berkembang memiliki sumber daya yang belum dikembangkan serta sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh sebab itu, dalam peningkatan produktivitas maka perlu dipercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik serta pengembangan sumber daya manusia melalui investasi dalam bidang pendidikan serta pelatihan.

Dalam hal tersebut harus sejalan dengan teori perangkap kemiskinan yang mengemukakan bahwa ketidakmampuan dalam mengarahkan saving yang cukup dan kurangnya perangsang dalam melakukan investasi modal dan taraf pendidikan, pengetahuan serta kemahiran yang relatif rendah adalah faktor utama yang menghambat terbentuknya investasi pada negara berkembang.

Teori Harrod Domar dalam Arsyad (1997) menyatakan bahwa model pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan dari teori Keynes. Teori ini menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa anggapan yang digunakan dalam teori tersebut yaitu perekonomian pada kondisi penuh (*full employment*) serta barang modal yang ada pada masyarakat dipakai secara penuh, adapula anggapan yang mengatakan bahwa pada perekonomian dua sektor (Rumah Tangga serta Perusahaan) berarti sektor pemerintahan serta

perdagangan tidak ada. Anggapan lain mengatakan besarnya tabungan masyarakat merupakan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai pada titik nol. Anggapan terakhir mengatakan kecenderungan dalam menabung (*Marginal Propensity To Save = MPS*) besarnya tetap, begitu juga pada perbandingan antar modal output (*Capital Output Ratio = COR*) serta perbandingan penambahan modal output (*Incremental Capital Output Ratio*). Teori tersebut mempunyai kelemahan yaitu kecenderungan menabung serta perbandingan penambahan modal output pada kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Didalam bentuk pertumbuhan endogen menyatakan bahwa semakin besar produksi secara agregat di suatu negara maka akan semakin tinggi investasinya. Dengan anggapan investasi swasta serta publik dalam kapital manusia bisa menghasilkan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) serta memicu produktivitas yang dapat mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Menurut (Deddy, 2008) model pertumbuhan endogen mengatakan bahwa teknologi tidak perlu ditunjukkan dalam menjelaskan proses terbentuknya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Harold Dommar memberikan perananan penting pada penanaman modal terhadap peranannya di dalam sistem pertumbuhan ekonominya khususnya mencakup karakter ganda yang dipunyai oleh penanaman modal. 1). Penanaman modal mempunyai peranan ganda yang mana bisa menghasilkan income. 2). investasi dapat meningkatkan muatan produksi suatu perekonomian dengan cara menaikkan stok modal (Jhingan, 1999 dalam Yunarko 2007). Hampir semua para ahli ekonomi

menekankan makna pentingnya pembentukan penanaman modal sebagai penentu yang paling utama dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi. Maksudnya adalah bahwa pendapatan masyarakatnya tidak digunakan semua untuk konsumsi, melainkan sebagian dari pendapatan tersebut ditabung mereka dan tabungan tersebut digunakan untuk investasi. Selanjutnya investasi tersebut dipandang sebagai suatu faktor pendorong untuk pembangunan ekonomi. Contohnya, penanaman modal pada akumulasi kapital yaitu tidak hanya untuk meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian pula ada hubungan yang positif antar pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara (Prasetyo, 2009).

Dalam usaha pembangunan ekonomi modal memegang peranan yang sangat penting, sebab akumulasi kapital dapat menentukan cepat atau lambatnya suatu pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan marak lesunya pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Yang mana penanaman modal tersebut bisa dilaksanakan dengan cara menghimpun akumulasi kapital dalam membangun sejumlah gedung serta peralatan yang berguna untuk kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan mengalami peningkatan.

Investasi baik dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah output serta penghasilan. Dengan demikian semakin besarnya

penanaman modal baik PMDN maupun PMA maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor swastas serta rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Hal tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mengalami peningkatan. Dengan demikian investasi PMDN serta PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

2.1.4 Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan PDRB

Menurut Halim (2004) pengeluaran pemerintah adalah suatu belanja modal wilayah yang manfaatnya selama satu tahun juga dapat menambahkan pendapatan wilayah serta dapat menaikkan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan dalam kelompok belanja administrasi umumnya.

Pengeluaran pemerintah merupakan belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperoleh aktiva tertentu (Nodiawan, 2006). Ada tiga cara dalam menghasilkan asset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri dan menukarkan dengan asset tetap lainnya serta juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. pengeluaran pemerintah mempunyai ciri-ciri yang spesifik serta menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Pengeluaran pada umumnya hanya dapat digunakan disektor publik, tidak disektor bisnis. pengeluaran disektor publik mencakupi dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan hubungan dengan aktivitas belanja dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya langsung serta biaya tidak langsung. Pembagian ini berdasarkan PP No. 15 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja langsung serta tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung pada program serta kegiatannya. Suatu aktivitas tidak akan berjalan tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung pada program serta kegiatannya.

Belanja pemerintah merupakan sebagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur jalannya suatu perekonomian dengan cara menentukan besarnya pendapatan untuk nasional serta APBD untuk regional (Sadono, 2000). Belanja pemerintah dalam bentuk pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai macam golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang terpisah. 1). pembelian pemerintah atas barang serta jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. 2) pajak serta transfer mempengaruhi hubungan antara output serta pendapatan (Y) dan transfer ke wilayah adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) yang dana

tersebut dialokasikan kepada wilayah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang meliputi dari Dana Perimbangan serta Dana otonomi.

Menurut Perdirjen Pembendaharaan ini, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1). pengeluaran ini berdampak dengan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambahkan masa umur, manfaat dan kapasitas; 2). pengeluarana ini melebihi batasan minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.1.5 Tenaga Kerja Dan PDRB

Tenaga kerja merupakan penduduk pada umur kerja yaitu 15-64 tahun. Penduduk pada usia kerja tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 2002). Angkata kerja terbagi golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur serta mencari kerja. Angkatan kerja merupakan orang yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang dalam mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku.

Sedangkan yang bukan angkatan kerja merupakan orang yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung pada komposisi jumlah penduduknya. Peningkatan jumlah penduduk yang termasuk kedalam golongan usia kerja dapat memperoleh angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak ini diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pusat Statistik menggolongkan tenaga kerja menjadi tiga bagian.

1).tenaga kerja penuh (*fullemployment*)merupakan tenaga kerja yang mempunyai jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan usia tugas. 2). tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*) adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu. 3). tenaga kerja yang belum bekerja (*unemployed*), merupakan tenaga kerja dengan jam kerja $0 \geq 1$ jam/minggu.

Menurut Todaro (2000) salah satu faktor positif yang memicu dalam pertumbuhan ekonomi secara tradisional adalah pertumbuhan penduduknya dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK). Di dalam jumlah tenaga kerja yang paling besar dapat menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang paling besar berarti ukuran pasar domestiknya paling besar pula. Meskipun demikian hal ini masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan yang cepat dapat memberikan akibat yang positif serta negatif pada pembangunan ekonomi.

Selanjutnya dinyatakan bahwa ada pengaruh positif serta negatifnya dari pertumbuhan penduduk tergantung dalam kemampuan sistem perekonomian wilayah ini dalam menyerap serta secara produktif menggunakan pertambahan tenaga kerja. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat serta jenis pengumpulan kapital dan tersedianya input serta faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat sama. Menurut

Lewis, angkatan kerja yang seragam serta tidak ada keahlian dianggap dapat bergerak serta beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar serta pada jumlah terbatas. Permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) yang meningkat bersumber dari pertumbuhan aktivitas sektor modern. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Nicholson (2002) fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan matematik antar input yang digunakan dalam memperoleh hasil tingkat output tertentu.

Menurut BPS penduduk yang berusia 15 tahun keatas terdiri dari Angkatan Kerja (AK) serta tidak (AK). Angkatan kerja dinyatakan bekerja apabila mereka melaksanakan pekerjaan dengan tujuannya menghasilkan pendapatan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontiniu selama seminggu yang. Sedangkan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan (Budi Santosa, 2001).

Jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja yaitu suatu gambaran keadaan dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin meningkat lapangan kerja yang tersedia maka semakin meningkat pula produksi pada wilayah tersebut (Kuncoro, 2004).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.1 : Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Ringkasan
1	Dwisetia Poerwono, 2014	Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di D.I.Yogyakarta (tahun 1996-2012)	Bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN), pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I.Yogyakarta
2	M.Ratmas a Serang, 2016	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Periode 2008-2014	Bahwa pengeluaran pemerintah, ekspor, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antar provinsi di kawasan timur Indonesia.
3	Untari, 2017	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dikawasan Subosukowosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen,Klaten) Provinsi Jawa Tengah	Di jawa tengah kawasan subosukowonosraten merupakan kawasan yang mempunyai pendapatan domestik regional bruto yang selalu relatif naik. Kerjasama yang baik antar daerah sendiri diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang merata sehingga pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan subosukowonosraten bisa lebih maju dan merata.

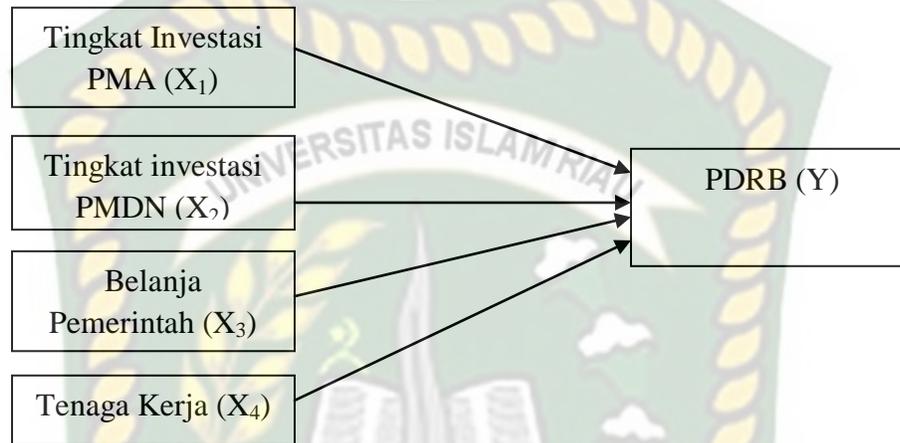
2.3 Kerangka Pikir

Secara rinci kerangka pemikiran pada penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah titik tolak dan pemberdayaan pemerintah wilayah secara lebih mandiri. Pembangunan wilayah dengan menggunakan sistem otonomi daerah bertujuan untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi (PDRB) serta kemakmuran masyarakat pada daerah tersebut. Di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, membutuhkan sumber dana dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tersebut, Provinsi Riau menggali dana dari investasi yang tersedia dan menggali potensi daerah tersebut. Agar dapat diketahui pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah serta tenaga kerja terhadap PDRB maka diperlukan analisa regresi berganda.

Penanaman modal pada dasarnya adalah mula dari suatu aktivitas pembangunan ekonomi, penanaman modal bisa dilaksanakan oleh pihak swasta, pemerintah atau kerjasama antar pemerintah dengan pihak swasta. Suatu sumber dana yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari pengelolaan sumber daya yang tersedia yang digunakan untuk pembangunan daerah disebut dengan belanja pemerintah. Tenaga kerja adalah suatu sumber daya potensial yang berguna sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana pada pembangunan daerah, sehingga daerah tersebut dapat maju. Ketiga aspek ini dapat mendorong dalam pertumbuhan serta perkembangan perekonomian

disuatu wilayah. Oleh karena itu, tingkat investasi, belanja pemerintah serta tenaga kerja merupakan suatu faktor pendorong untuk meningkatkan PDRB.

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir



2.5 Hipotesa

Agar bisa mengarahkan hasil penelitian tersebut, maka disampaikan suatu hipotesa pada penelitian. Hipotesa tersebut dapat di uji kebenarannya dan hasil ujian tersebut dapat digunakan untuk masukan dalam menentukan kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hipotesa merupakan suatu pernyataan yang dijelaskan dan kebenarannya masih lemah. Hipotesa juga masih di pandang sebagai konklusi yang bersifat sementara. Berdasarkan penjelasan latar belakang, rumusan masalah diatas maka dapat di ambil hipotesa sebagai berikut :

“Di dugaTingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam kegiatan ekonomi yang cukup pesat.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan pada penelitian tersebut yaitu data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari 2009-2018. Data sekunder adalah suatu data yang didapatkan melalui pihak ketiga, tidak langsung didapatkan dari peneliti yang bersumber dari subjek penelitiannya. Data sekunder bersumber dari data dokumentasi atau data laporan yang telah ada (Azwar, 2001).

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang meliputi :
 - a. Data PMA dan PMDN tahun 2009-2018
 - b. Data Belanja Pemerintah tahun 2009-2018
 - c. Data Tenaga Kerja tahun 2009-2018
2. Serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian, seperti google dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka pengumpulan data yang dilakukan/diterapkan didalam penulisan ini adalah dengan cara teknik dokumentasi yaitu dengan mendatangi langsung instansi-instansi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis juga mengadakan wawancara dengan pihak instansi terkait, setelah itu pihak instansi tersebut memberikan lembaran-lembaran data untuk penelitian (variabel-variabel yang diperlukan).

3.4 Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu gejala yang bermacam-macam. Variabel dapat dimaknai sebagai suatu objek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian pada suatu penelitian. Variabel dalam penelitian tersebut terdiri dari :

1. Variabel Bebas (*Independent Variables*)

Variabel bebas merupakan suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Selain itu variabel bebas dapat pula dikatakan sebagai yang ingin diketahui pengaruhnya (Azwar, 2001).

Pada penelitian tersebut yang merupakan variabel bebasnya yaitu:

- a. PMA (Penanaman Modal Asing) (X_1)

PMA merupakan suatu penanaman modal yang diberikandari pihak investor asing berupa investasi langsung yang telah terealisasi di Provinsi Riau yang dinyatakan dalam satuan Juta US\$.

b. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) (X_2)

PMDN merupakan seluruh Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah disepakati dan sudah terealisasi di Provinsi Riau. Pada penelitian tersebut menggunakan data nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Riau yang dinyatakan dalam satuan milyar rupiah.

c. Belanja Pemerintah (X_3)

Pengeluaran pemerintah adalah suatu belanja pemerintah daerah yang fungsinya lebih dari satu tahun serta dapat menambah asset (Halim, 2004).

d. Tenaga Kerja (X_4)

Tenaga kerja merupakan jumlah seluruh penduduk pada suatu Negara dalam memproduksi barang serta jasa ketika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, serta ketika mereka mau ikut peran pada kegiatan itu. Tenaga kerja merupakan suatu penduduk pada umur kerja antara 15 -64 tahun (Suparmoko, 2002).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variables*)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel lain maka penelitian tersebut dapat menggunakan dengan variabel terikat. Besarnya pengaruh ini dapat dilihat membesar-mengecilnya, atau berubahnya variasi yang terlihat sebagai dampak perubahan didalam variabel lainnya (Azwar, 2001).

Pada penelitian ini menggunakan variabel terikatnya yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (Y).

3.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian tersebut menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. Pada metode statistika ini alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Menurut Nawari (2010) analisis regresi adalah metode sederhana yang digunakan untuk melakukan investigasi tentang suatu hubungan fungsional antara beberapa variabel.

Pada penelitian ini metode analisis yang dipakai yaitu model analisis inferensial yang menggunakan eviews 9.0. Inferensial merupakan analisis regresi berganda agar dapat diketahui pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah serta tenaga kerja terhadap PDRB di Riau.

Formulasi dalam persamaan regresi berganda Gujarati dalam Ghozali (2011) yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Yang mana :

Y : PDRB (Milyar Rupiah)

β_0 : Konstanta

β_1 - β_4 : Parameter

X_1 : PMA (Juta US\$)

X_2 : PMDN (Milyar Rupiah)

X_3 : Belanja Pemerintah (Juta Rupiah)

X_4 : Tenaga Kerja (orang)

ε : Error Term (Kesalahan)

Secara ekonometrika model yang dinilai baik bila memenuhi semua kondisi ideal suatu model. Secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi dalam variabel bebas (independent variable), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel bebas, jika saling berkorelasi maka variabel ini tidak orthogonal. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari value inflation factor (VIF) apabila nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas begitu pula sebaliknya jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Uji ini merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel terikat tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variabel terikat tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri baik nilai sebelumnya maupun nilai periode nilai sesudahnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan melihat angka DW apabila :

- Angka DW dibawah -2 berarti ada korelasi positif
- Angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

c. Uji Normalitas

Uji ini merupakan pengujian tentang kenormalan distribusi data, penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah data tersebut harus berdistribusi secara normal, maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Uji normalitas dapat dilihat dari p-p plot atau dengan melihat histogram residualnya dan mengikuti ketentuan :

- apabila data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- apabila data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal serta grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas mempunyai suatu keadaan bahwa varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID yang tergambar dalam scatterplot dengan pengambilan keputusan :

- apabila ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- apabila ada pola yang jelas secara titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Uji T Statistika

Uji T merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terikat. Pada uji tersebut dilihat melalui derajat signifikan variabel bebasnya.

Ho = tidak ada pengaruh dalam ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat

Hi = ada pengaruh dalam ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat

Aturan pengambilan keputusan menurut Santoso (2004).

- Jika prob (signifikan) $> 0,05$ (a) maka Ho diterima
- Jika prob (signifikan) $< 0,005$ (a) maka Hi diterima

Dengan menggunakan derajat kebebasan sebesar 5% atau 0,05. Uji-t dipakai dalam pengujian signifikan pada pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah, serta Tenaga Kerja terhadap PDRB.

b. Uji F Statistika

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yang perlu dilakukan

pengujian koefisien regresinya secara serentak. Dalam pengujian tersebut digunakan eviews 9.0.

Ho = tidak ada pengaruh dalam ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hi = ada pengaruh dalam ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat.

Aturan dalam pengambilan keputusan menurut Santoso (2004):

- Ketika prob (signifikan) $> 0,05$ (a) maka Ho diterima
- Ketika prob (signifikan) $< 0,005$ (a) maka Hi diterima

Dengan menggunakan derajat kebebasan sebesar 5% atau 0,05. Uji-f dipakai dalam menguji signifikansi pada pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah, serta Tenaga Kerja terhadap PDRB.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 memaparkan tentang seberapa besar peranan variabel bebas terhadap variabel terikat, semakin besar R^2 maka semakin besar pula peranan variabel dalam memaparkan variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0-1.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Provinsi Riau

4.1.1 Keadaan Alam

Kata Provinsi Riau berasal dari bahasa Portugis yakni : *Pertama*, “rio” yang artinya sungai. *Kedua*, berasal dari kata riahi yang artinya air laut. *Ketiga*, menyebutkan bahwa kata tersebut berasal dari penuturan masyarakat setempat, yang diangkat dari kata riuh yang artinya ramai. Besar kemungkinan nama ini memang berasal dari penamaan rakyat setempat, yaitu orang melayu yang hidup di daerah Bintan, yang saat ini masuk wilayah Kepulauan Riau.

Provinsi Riau terbagi dari daerah daratan serta perairan, dengan luas wilayah 8.915.016 hektar. Disamping itu di daerah lautan yang berbatasan dengan negara lain diperkirakan luas daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu 379.000 km². Keberadaannya membentang lereng dari Bukit Barisan hingga Selat Malaka, terletak antara 01⁰⁵'00” Lintang Selatan hingga 02⁰⁵'00” Lintang Utara atau antara 100⁰⁰'00” Bujur Timur sampai 105⁰⁵'00” Bujur Timur.

Di wilayah daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman kurang lebih 6 m serta sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan dataran

tinggi. Bukit barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan ini dipengaruhi pasang surut laut. Batas-batas wilayah Riau yaitu :

- Sebelah Utara : Selat Singapura , Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi, Selat Berhala dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Laut Cina Selatan, Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan batas-batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau yaitu :

1. Kabupaten Kuantan Singingi
 - Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
 - Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
 - Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
 - Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu
2. Kabupaten Indragiri Hulu
 - Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
 - Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
 - Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
 - Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hilir
3. Kabupaten Indragiri Hilir
 - Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
 - Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
 - Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
 - Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

4. Kabupaten Pelalawan
 - Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
 - Sebelah Barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
 - Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
5. Kabupaten Siak
 - Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
 - Sebelah Barat : Kota Pekanbaru
 - Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti
6. Kabupaten Kampar
 - Sebelah Utara : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
 - Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
 - Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan dan Siak
7. Kabupaten Rokan Hulu
 - Sebelah Utara : Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
 - Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
 - Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

8. Kabupaten Bengkalis
 - Sebelah Utara : Selat Malaka
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Siak
 - Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
 - Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
9. Kabupaten Rokan Hilir
 - Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis
 - Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Utara
 - Sebelah Timur : Kota Dumai
10. Kabupaten Kepulauan Meranti
 - Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Siak
 - Sebelah Barat : Kabupaten Siak
 - Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
11. Kota Pekanbaru
 - Sebelah Utara : Kabupaten Siak
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan
 - Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
 - Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan
12. Kota Dumai
 - Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis

- Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis

4.1.2 Iklim Dan Curah Hujan

Di daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1.700-4.000 mm/tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Wilayah yang sering ditimpa hujan selama tahun 2012 yaitu Kota Pekanbaru 214 kali, Kabupaten Rokan Hulu 191 kali, Kota Dumai 163 kali, Kabupaten Kampar 147 kali serta Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah hari hujan 140 kali.

Jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2012 terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dengan curah hujan sebesar 4.081,0 mm, disusul Kabupaten Kampar sebesar 2.846,1 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1.722,0 mm.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru juga mengeluarkan data jumlah titik api. Pada tahun 2012 jumlah titik api paling banyak yaitu di Kabupaten Pelalawan dengan 922 titik api, disusul dengan Kabupaten Rokan Hilir dengan 712 titik api dan kabupaten indragiri hulu dengan 600 titik api serta yang paling sedikit Kota Pekanbaru dengan 9 titik api.

4.2 Pemerintahan

Provinsi Riau dikepalai oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah dengan satu orang Wakil Gubernur. Di dalam melaksanakan tugasnya, terdapat tiga organisasi

perangkat staf pemerintahan wilayah yakni : Sekretaris Daerah (SEKDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA). Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selain bertugas secara teknis, juga mengkoordinir serta mengintegrasikan usaha, penyusunan rencana serta program kerja. Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) merupakan unsur pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai rencana dan peraturan yang berlaku.

Pada wilayah Provinsi Riau terdapat 10 Kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) dan 2 kota yakni Kota Pekanbaru serta Kota Dumai. setiap kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan kota oleh seorang Walikota. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau pada juni tahun 2014 Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) Asisten dan 7 (tujuh) Biro yaitu :

1. Asisten I Bidang Pemerintahan membawahi :
 - a. Biro Bina Pemerintahan serta Hubungan Masyarakat
 - b. Biro Hukum
2. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra membawahi :
 - a. Biro Ekonomi dan Pembangunan
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten III Bidang Administrasi Umum membawahi :
 - a. Biro Umum
 - b. Biro Keuangan

c. Biro Perlengkapan

Berikut ini dapat disajikan data mengenai banyaknya kecamatan dan kelurahan/desa menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Tabel 4.1 : Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Kuantan singingi	15	229
2	Indragiri hulu	14	194
3	Indragiri hilir	20	236
4	Pelalawan	12	118
5	Siak	14	131
6	Kampar	21	250
7	Rokan hulu	16	145
8	Bengkalis	11	155
9	Rokan hilir	15	184
10	Kepulauan meranti	9	101
11	Pekanbaru	12	83
12	Dumai	7	33
	Provinsi riau	166	1.859

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.1 bisa dilihat bahwa jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Riau yaitu sebanyak 166 kecamatan dan jumlah kelurahan/desa sebanyak 1.859 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang Lurah /Kepala Desa. Kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan paling banyak adalah Kabupaten Kampar

sebanyak 21 kecamatan, sedangkan yang terkecil adalah Kota Dumai yang hanya memiliki 7 kecamatan. Selanjutnya kabupaten/kota dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak yaitu adalah Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 250 kelurahan/desa, sedangkan yang terkecil adalah Kota Dumai yaitu 33 kelurahan/desa.

4.3 Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam suatu produksi, sebab penduduk merupakan sumber dari pada faktor tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan suatu barang dan jasa.

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Provinsi Riau Tahun 2009-2018 (Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2009	5.365.358
2010	5.574.928
2011	5.726.241
2012	5.879.109
2013	6.033.268
2014	6.188.442
2015	6.344.402
2016	6.500.971
2017	6.657.911
2018	6.074.647

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk paling banyak adalah pada tahun 2017. Dan jumlah penduduk paling sedikit terjadi pada tahun 2009.

Masalah kependudukan merupakan masalah yang paling dirasakan dampaknya. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dikarekan semakin banyaknya pendatang dari provinsi lain yang kemudian menetap di Provinsi Riau untuk mencari pekerjaan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh mobilitas penduduk yang sangat tinggi yang terjadi di wilayah tersebut dan juga disebabkan oleh tingkat kelahiran.

Penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kependudukan. Ketidak mertaan dapat menimbulkan kondisi yang kurang sehat bagi kegiatan ekonomi, pertahanan keamanan dan keadilan sosial lainnya. Untuk itu pemerintah mengusahakan penyebaran penduduk yang lebih merata dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya, yang disebut transmigrasi. Dalam usaha peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja ahli untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang kini mulai pulih setelah mengalami krisis yang berkepanjangan. Namun demikian, perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengurangi pertumbuhan penduduk karena pertumbuhan yang cepat akan menimbulkan masalah seperti, pengadaan kebutuhan pokok secara total dituntut lebih besar dari penyediaannya dan penambahan penduduk juga akan menambah jumlah angkatan kerja, hal ini juga merupakan kewajiban pemerintah untuk memperluas lapangan kerja untuk menanggulangi tingginya tingkat pengangguran.

4.4 Pertumbuhan Ekonomi

Negara Indonesia termasuk dalam peran desentralisasi fiskal dalam mendorong perkembangan ekonomi telah menjadi perhatian banyak Negara. Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara efektif sebagai strategi dalam memperlaju pembangunan wilayah. Kebijakan desentralisasi fiskal tersebut juga telah membawa perubahan besar pada perkembangan penerimaan serta pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu sistem yang mana terjadi peningkatan produk nasional bruto riil.

Tabel 4.3 : PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	366.939,61	2,97
2010	388.578,96	4,21
2011	410.215,84	5,57
2012	425.626,00	3,76
2013	436.187,51	2,48
2014	447.986,78	2,71
2015	448.991,96	0,22
2016	458.769,34	2,18
2017	471.081,71	2,68
2018	482.087,22	2,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa PDRB Provinsi Riau dalam milyar rupiah mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan karena kenaikan pengeluaran pemerintah Provinsi Riau yang secara bertahap telah mengalami kenaikan yang positif. Dan pada tahun 2018 PDRB Provinsi Riau mencapai sebesar 482.087,22 milyar rupiah.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau, agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur maka dapat dilakukan kegiatan pembangunan nasional dalam segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, pembangunan nasional tersebut bertujuan agar masyarakat mencapai hidup yang adil dan makmur serta spiritual berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan kerakyatan yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam bermasyarakat. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan hasil penelitian sebagai gambaran dari instansi-instansi yang terkait dalam penelitian tersebut.

5.1 Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Riau.

5.1.1 Tingkat Investasi Provinsi Riau

Menurut Sukirno (2004), investasi diartikan suatu pengeluaran dalam membeli barang modal serta peralatan produksi bertujuan untuk menggantikan dan menambahkan barang modal dalam perekonomian yang akan dipakai dalam memproduksi barang serta jasa untuk masa depan. Perekonomian daerah Riau tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di Riau. Yang mana dalam usaha pembangunan wilayah Provinsi Riau dibutuhkan investasi yang terus meningkat serta harus dicukupi dengan melihat keterampilan wilayah masing-masing serta

keterampilan nasional. Maka dari itu dibutuhkan pengerahan dana, simpanan masyarakat, simpanan pemerintah serta dana dari luar.

Nilai realisasi investasi di Provinsi Riau adalah besarnya realisasi investasi pada proyek yang telah disetujui oleh pemerintah Provinsi Riau pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk melihat nilai realisasi investasi penanaman modal di Riau dari tahun 2009-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 : Perkembangan Nilai Realisasi PMDN Provinsi Riau Tahun 2009-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2009	3.386,00
2010	1.037,10
2011	7.462,60
2012	5.450,40
2013	4.874,30
2014	7.707,60
2015	9.943,00
2016	6.613,70
2017	10.829,80
2018	9.056,40

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Berdasarkan pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa PMDN Provinsi Riau tahun 2009-2018 dalam milyar rupiah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009-2010 PMDN Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 2.348,90 milyar rupiah. Pada tahun 2011 PMDN Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 7.462,60 milyar rupiah.

Pada tahun 2012-2013 PMDN Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 576,10 milyar rupiah. Pada tahun 2014-2015 PMDN Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 2.235,40 milyar rupiah. Pada tahun 2016 PMDN Provinsi Riau mengalami penurunan kembali sebesar 6.613,70 milyar rupiah. Dan pada tahun 2017 PMDN Provinsi Riau mengalami peningkatan kembali sebesar 10.829,80 milyar rupiah dan ditahun 2018 PMDN Provinsi Riau kembali mengalami penurunan.

Tabel 5.2 : Perkembangan Nilai Realisasi PMA Provinsi Riau Tahun 2009-2018 (Juta US\$)

Tahun	Penanaman Modal Asing (PMA)
2009	651,60
2010	1.066,60
2011	512,30
2012	1.152,90
2013	1.304,90
2014	1.369,50
2015	753,40
2016	869,10
2017	1.061,10
2018	1.022,80

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Riau dalam Juta US\$ mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan karena nilai tukar USD yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan

penguatan USD di pasar global. Itu menunjukkan bahwa Provinsi Riau masih belum menjadi daya tarik bagi para investor asing guna untuk menginvestasikan modalnya ke Riau.

5.1.2 Belanja Pemerintah Provinsi Riau

Menurut Halim (2004) belanja modal adalah suatu belanja pemerintah daerah yang manfaatnya satu anggaran dan dapat menambahkan asset daerah serta dapat menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umumnya.

Tabel 5.3 : Jumlah Belanja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2009-2018 (Juta Rupiah)

Tahun	Belanja Pemerintah
2009	3.116.774
2010	5.305.987
2011	4.538.187
2012	5.425.711
2013	6.232.409
2014	5.170.603
2015	9.627.234
2016	10.972.074
2017	12.247.194
2018	10.326.452

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa belanja pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan perkembangan

Provinsi Riau akan menunjukkan laju penerimaan dan belanja pemerintah kota yang kemudian akan menopang sistem perekonomian daerah.

Pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa belanja pemerintah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009-2010 mengalami peningkatan 3.116.774 – 5.305.987. Dan pada tahun 2015-2017 belanja pemerintah mengalami peningkatan sebesar 9.627.234 – 12.247.194. Dan pada tahun 2018 belanja pemerintah mengalami penurunan sebesar 10.326.452.

5.1.3 Tenaga Kerja Provinsi Riau

Pertumbuhan angkatan kerja sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk pada setiap tahunnya, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja pada suatu wilayah merupakan faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin banyak jumlah angkatan kerja yang bekerja maka semakin produktif tenaga kerja tersebut dan pada akhirnya dapat menaikkan output daerah. Tenaga kerja merupakan penduduk pada usia kerja yaitu 15-64 tahun. Penduduk pada usia kerja tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 2002).

Berdasarkan dari hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2018 jumlah penduduk di Provinsi Riau yang termasuk dalam angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2009-2018 cenderung mengalami kenaikan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.4 : Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Di Provinsi Riau Tahun 2009-2018 (Orang)

Tahun	Tenaga kerja
2009	2.067.357
2010	2.170.247
2011	2.311.171
2012	2.399.851
2013	2.479.493
2014	2.518.485
2015	2.554.296
2016	2.765.946
2017	2.781.021
2018	2.915.597

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Berdasarkan tabel 5.5 diatas dapat dilihat bahwa angkatan kerja di Provinsi Riau yang termasuk dalam kategori yang bekerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2009 banyaknya tenaga kerja di Provinsi Riau me sebesar 2.067.357 orang. Pada tahun 2010 tenaga kerja meningkat sebesar 2.170.247 orang. Dan pada tahun 2018 tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Riau mencapai sebesar 2.915.597 orang.

5.1.4 PDRB Provinsi Riau

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) perkapita. Pertumbuhan ekonomi berarti barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat mengalami perkembangan kegiatan dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2010).

Tabel 1.1 : PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	366.939,61	2,97
2010	388.578,96	4,21
2011	410.215,84	5,57
2012	425.626,00	3,76
2013	436.187,51	2,48
2014	447.986,78	2,71
2015	448.991,96	0,22
2016	458.769,34	2,18
2017	471.081,71	2,68
2018	482.087,22	2,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2019

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB di Provinsi Riau pada tahun 2009 sebesar 366.939,61. Di tahun 2010 PDRB di Provinsi Riau sebesar 388.578,96. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Riau meningkat lagi sebesar 410.215,84. Dan hingga pada tahun 2018 PDRB di Provinsi Riau mencapai sebesar 482.087,22 milyar rupiah.

5.2 Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Riau

Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Riau, bisa dilihat dari hasil olahan dibawah ini :

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 12/08/19 Time: 20:37
 Sample: 1 10
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	139198.4	30279.67	4.597090	0.0059
X ₁	2.959046	0.919599	3.217755	0.0235
X ₂	22.53823	7.312383	3.082200	0.0274
X ₃	-0.000217	0.001212	-0.179186	0.8648
X ₄	0.101905	0.017650	5.773503	0.0022
R-squared	0.989891	Mean dependent var		433646.5
Adjusted R-squared	0.981803	S.D. dependent var		36394.22
S.E. of regression	4909.411	Akaike info criterion		20.14255
Sum squared resid	1.21E+08	Schwarz criterion		20.29384
Log likelihood	-95.71274	Hannan-Quinn criter.		19.97658
F-statistic	122.3985	Durbin-Watson stat		1.546395
Prob(F-statistic)	0.000036			

Dari hasil estimasi diatas maka didapat fungsi persamaan sebagai berikut :

$$Y = 139198,4 + 2,9590X_1 + 22,5382X_2 - 0,0002X_3 + 0,1019X_4 +$$

e

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh empat variabel bebas (tingkat investasi PMA dan PMDN, belanja pemerintah dan tenaga kerja) terhadap

variabel terikat (PDRB). Dari variabel tingkat investasi PMA (X_1) dan PMDN (X_2), belanja pemerintah (X_3) serta tenaga kerja (X_4) tersebut, ada yang berpengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB (Y) di Provinsi Riau. Dan ada juga yang tidak berpengaruh terhadap PDRB (Y) di Provinsi Riau. Berikut akan dipaparkan tentang pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah serta tenaga kerja secara rinci.

5.2.1 Interpretasi Hasil

1. Koefisien Regresi

Berikut dari hasil persamaan diatas yaitu tingkat investasi PMA (X_1) dan PMDN (X_2), belanja pemerintah (X_3) serta tenaga kerja (X_4) terhadap PDRB (Y) di Provinsi Riau dengan analisis regresi sebagai berikut :

- a. Konstanta b_0 139.198,4 artinya besarnya PDRB di Provinsi Riau jika tingkat investasi PMA (X_1) dan PMDN (X_2), belanja pemerintah (X_3) serta tenaga kerja (X_4) sama dengan 0 yaitu sebesar 139.198,4 milyar rupiah.
- b. Nilai koefisien b_1 yaitu sebesar 2,959046 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti bahwa variabel tingkat investasi PMA (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau. Pengaruh tersebut artinya apabila terjadi penambahan tingkat investasi PMA sebesar 1% maka akan meningkatkan PDRB sebesar 2,959046 Juta US\$.
- c. Nilai koefisien b_2 yaitu sebesar 22,53823 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti bahwa variabel tingkat investasi PMDN (X_2) berpengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau. Pengaruh tersebut artinya apabila

terjadi penambahan tingkat investasi PMDN sebesar 1% maka akan meningkatkan PDRB sebesar 22,53823 milyar rupiah.

- d. Nilai koefisien b_3 yaitu sebesar -0,000217 dan berdasarkan uji T (Parsial) tidak berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Riau.
- e. Nilai koefisien b_4 yaitu sebesar 0,101905 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti bahwa variabel tenaga kerja (X_4) berpengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau. Pengaruh tersebut artinya apabila terjadi penambahan tenaga kerja sebesar 1% maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,101905 orang.

5.3 Uji Statistik

a. Uji T (Parsial)

Menurut (ghozali, 2005) uji parsial digunakan untuk menunjukkan berapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual di dalam menjelaskan variabel terikat. Uji T tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara T signifikan dengan $\alpha = 0,05$. Dengan kriteria sebagai berikut:

apabila $T \text{ Prob} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak

apabila $T \text{ Prob} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima

1. Pengujian pengaruh tingkat investasi PMA (X_1) terhadap PDRB (Y) di Provinsi Riau.

Berdasarkan uji t, maka dapat dilihat dari nilai probabilitas tingkat investasi PMA (X_1) yaitu ($0,0235 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Artinya tingkat investasi PMA berpengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau.

2. Pengujian tingkat investasi PMDN (X_2) terhadap PDRB (Y) di Provinsi Riau
Berdasarkan uji t, maka dapat dilihat dari nilai probabilitas tingkat investasi PMDN (X_2) yaitu ($0,0274 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Artinya tingkat investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau.
3. Pengujian belanja pemerintah (X_3) terhadap PDRB (Y) di Provinsi Riau.
Berdasarkan hasil uji t, maka dapat dilihat dari nilai probabilitas belanja pemerintah (X_3) yaitu ($0,8648 > 0,05$) maka H_0 diterima. Artinya belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau.
4. Pengujian tenaga kerja (X_4) terhadap PDRB (Y) di Provinsi Riau.
Berdasarkan hasil uji t, maka dapat dilihat dari nilai probabilitas tenaga kerja (X_4) yaitu ($0,0022 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Artinya tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau.

c. Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.

Jika $F_{\text{prob}} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika $F_{\text{prob}} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima

Dari hasil uji F (simultan) dapat diketahui bahwa uji F prob sebesar $0,000036 > \alpha$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Riau.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

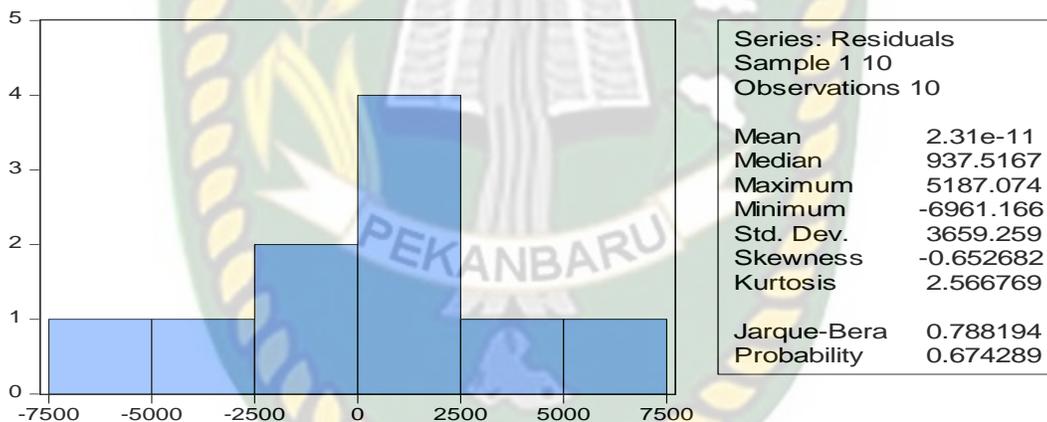
Koefisien determinasi menetapkan pada kemampuan dari variabel bebas (X) dalam menjelaskan variabel terikat (Y). Koefisien determinasi dipakai dalam menghitung berapa besar variabel terikat bisa dipaparkan oleh varian variabel bebas. Nilai dari R^2 paling besar 1 dan paling kecil 0 ($0 < R^2 < 1$). jika $R^2 = 0$ maka garis regresi tidak bisa dipakai dalam membuat ramalan variabel terikat, karena variabel yang dimasukkan kedalam persamaan regresi tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 0.

Dari hasil regresi tersebut pengaruh variabel X yaitu PMA, PMDN, belanja pemerintah serta tenaga kerja terhadap PDRB (Y) diperoleh hasil nilai R^2 sebesar 0,989891 yang menunjukkan bahwa 98% dari variasi perubahan PDRB (Y) mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel-variabel PMA (X_1), PMDN (X_2), belanja pemerintah (X_3) serta tenaga kerja (X_4). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam model sehingga R^2 sebesar 0,989891 dinyatakan dalam model valid.

5.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya telah berkontribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu mempunyai distribusi data normal atau mendekati data normal. Untuk mengetahui apakah model regresi itu normal atau tidak, dapat dilihat dari grafik histogram residual yang pada umumnya berbentuk lonceng jika memiliki distribusi normal dan juga melakukan uji jarque-bera. Berikut grafik normalitas :



Dari hasil estimasi regresi tersebut, dapat dilihat bahwa histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka keempat variabel ini mempunyai distribusi yang tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan uji Jarque-Bera diketahui bahwa nilai JB adalah 0,788194 dan nilai Chi-Square adalah 11,070. Nilai JB lebih kecil dari Chi-Square yang model regresi tersebut memiliki distribusi yang tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja. apabila tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja memiliki korelasi, maka hal tersebut tidak orthogonal. Dikatakan orthogonal, jika nilai korelasi antar tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja sama dengan nol. Pengujian tersebut dilakukan dengan melihat nilai VIF dengan ketentuan sebagai berikut : apabila nilai $VIF < 10$ maka model tidak ditemukan model adanya multikolinearitas, dan apabila nilai $VIF > 10$ maka model ini ditemukan adanya multikolinearitas.

Berikut ini gambar uji multikolinearitas :

Variance Inflation Factors
Date: 12/08/19 Time: 20:39
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9.17E+08	380.4026	NA
X ₁	0.845663	18.35056	2.899329
X ₂	53.47094	22.68890	1.537822
X ₃	1.47E-06	38.02097	5.532579
X ₄	0.000312	814.1267	8.629219

Berdasarkan hasil olahan data, maka dilihat nilai VIF dari variabel bebas yaitu : VIF X₁ (tingkat investasi PMA) yaitu 2,899329, nilai VIF X₂ (tingkat investasi PMDN) yaitu 1,537822, nilai VIF X₃ (belanja pemerintah) yaitu 5,532579 dan nilai VIF X₄ (tenaga kerja) yaitu 8,629219. Dapat diketahui bahwa

nilai VIF dari keempat variabel bebas tersebut lebih kecil dari 10. Artinya variabel tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja tersebut tidak terkena multikolinearitas. Hal tersebut berarti antara tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja tidak memiliki hubungan linear dalam model regresi tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas, dapat dilihat dari nilai Chi Square (Obs*R-Squared) serta nilai kritis Chi-Square dengan ketentuan sebagai berikut : jika nilai Chi Square lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut grafik uji heteroskedastisitas :

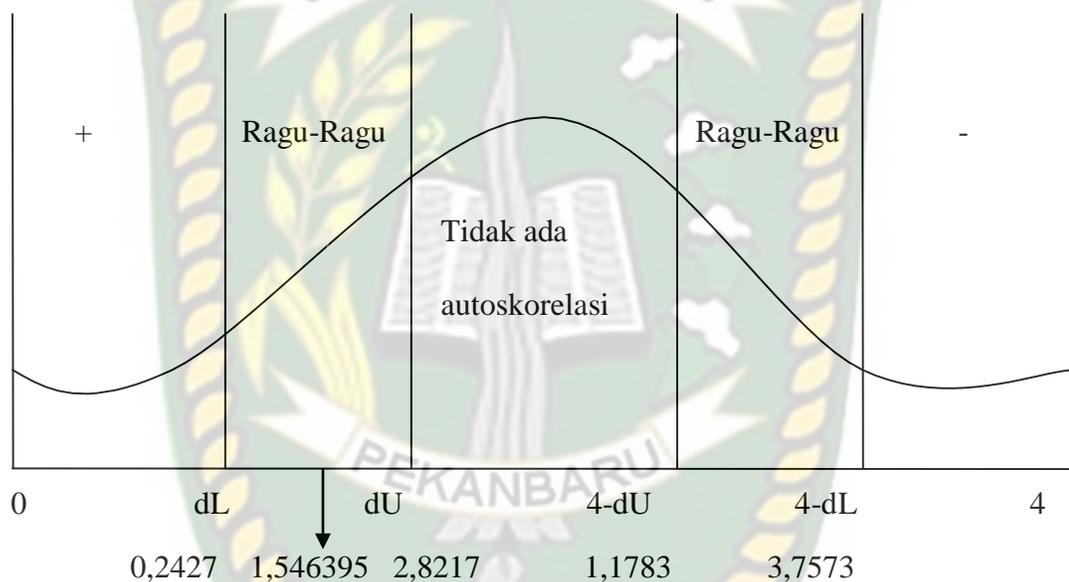
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.559775	Prob. F(4,5)	0.3152
Obs*R-squared	5.551245	Prob. Chi-Square(4)	0.2353
Scaled explained SS	1.087169	Prob. Chi-Square(4)	0.8963

Berdasarkan dari hasil olahan data tersebut, maka dapat diketahui nilai Obs*R-Square yaitu 0,2353. Sedangkan nilai kritis Chi-Square yaitu 11,070 maka dapat dilihat dari Obs*R-Square lebih kecil dari nilai kritis Chi-Square yang maknanya model regresi tersebut tidak terkena heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi atau tidak terdapatnya korelasi antara variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Model regresi yang baik yaitu regresi yang tidak terkena autokorelasi. Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan pengujian durbin-waston. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar dibawah ini :



Dari hasil pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai D-W yaitu sebesar 1,546395. apabila dilihat dari kurva D-W maka nilai tersebut terletak antara 2 sampai $4-dU$ dan berada pada kriteria ragu-ragu pada autokorelasi. Hal ini berarti dalam model regresi linear tersebut terdapat autokorelasi atau tidak ada autokorelasi.

5.5 Pembahasan

5.5.1 Tingkat Investasi Terhadap PDRB

a. Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan hasil regresi diatas, dapat dilihat bahwa investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terdapat pengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau. Yang mana nilai koefisien Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 2,959046, yang artinya setiap Penanaman Modal Asing (PMA) naik sebesar 1 Juta US\$ maka akan meningkatkan PDRB sebesar 2,959046. Sesuai dengan analisa neo-klasik tradisional, penanaman modal asing secara langsung merupakan hal yang positif, sebab hal ini bisa mengisi kekurangan saving yang dihimpun dari dalam negeri serta dapat menambah devisa dan membantu akumulasi modal domestik bruto.

Arwiny Fajriah Anwar (2011) pernah melakukan penelitian yang sama juga. Dengan hasil investasi PMA berperan aktif dalam mendorong perekonomian suatu daerah baik dalam peran kemajuan teknologi yang dimiliki oleh pihak asing, maupun jaringan kuat terhadap lembaga internasional serta pasar global.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dari hasil regresi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdapat pengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau. Yang mana nilai koefisien Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 22,53823, yang artinya setiap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik sebesar 1 Milyar Rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 22,53823. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Harold Dommar (dalam Jhingan 1999) yang sangat memberikan

peran penting pada investasi terhadap peranannya dalam sistem pertumbuhan ekonomi. Eko Prasetyo (2011) melakukan penelitian yang sama yang mana PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Semakin meningkatnya investasi PMDN yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka ketersediaan barang publik dapat meningkat serta mendorong peningkatan PDRB.

5.5.2 Belanja Pemerintah Terhadap PDRB

Belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat melalui koefisien regresi X_3 yaitu sebesar $-0,000217$. Yang mana setiap penurunan 1 Juta rupiah belanja pemerintah maka dapat mengurangi $-0,000217$ (*Ceteris Paribus*) PDRB di Provinsi Riau. Hal tersebut dikarenakan belanja pemerintah tidak efektif dalam meningkatkan PDRB di Provinsi Riau karena pada kenyataannya pada saat ini belanja pemerintah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti korupsi. Yang mana seharusnya belanja pemerintah digunakan sebagai pembangunan sarana prasarana seperti infrastruktur dan lain-lain. Rontisulu dkk (2017) melakukan penelitian yang sama yang mana belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa belanja pemerintah belum terarah dengan baik yang seharusnya belanja pemerintah digunakan sebagai pembangunan infrastruktur tapi malah digunakan dengan kepentingan individu saja.

5.5.3 Tenaga Kerja Terhadap PDRB

Dari hasil regresi diatas dapat diketahui bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Riau. Yang mana koefisien regresi X_4 sebesar 0,101905. Yang artinya setiap penambahan 1 orang tenaga kerja maka akan menaikkan PDRB di Provinsi Riau sebesar 0,101905. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tersedia dapat menyerap tenaga kerja dengan baik meskipun belum dapat menyerap seluruh tenaga kerja. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian Deddy Rustiono (2008) bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah tenaga kerja terserap pada suatu daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingginya jumlah tenaga kerja ini terserap disebabkan karena banyaknya industri di Jawa Timur yang bersifat padat karya. Sumber daya manusia tidak saja penting dari sudut kuantitas, tetapi yang tidak kalah penting adalah kuantitasnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal. Meskipun jumlah tenaga kerja pada Provinsi Jawa Timur secara nominal meningkat dari tahun ke tahun tetapi kualitasnya masih saja belum memadai untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. - Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau dengan nilai koefisien sebesar 2,959046 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0235. Ketika Penanaman Modal Asing (PMA) naik maka akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan masyarakat yang ada disekitar daerah tersebut dapat bekerja. Semakin banyak orang bekerja maka semakin meningkat PDRB.
- Penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau dengan nilai koefisien 22,53823 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0374. Ketika Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Dan ketika kesejahteraan masyarakat meningkat maka akan berpeluang tinggi terhadap PDRBnya.
2. Belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau dengan nilai koefisien sebesar -0,000217 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,8648. Hal tersebut dikarenakan belanja pemerintah tidak efektif dalam meningkatkan PDRB di Provinsi Riau karena pada kenyataanya pada

saat ini belanja pemerintah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti korupsi. Yang mana seharusnya belanja pemerintah digunakan sebagai pembangunan sarana prasarana seperti infrastruktur dan lain-lain.

3. Tenaga kerja berpengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau dengan nilai koefisien sebesar 0,101905 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0022. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya tenaga kerja yang terampil maka semakin meningkat PDRB di Provinsi Riau.
4. Variabel penelitian penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap PDRB di Provinsi Riau.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian serta kesimpulan yang didapat, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1.- Pemerintah daerah diharapkan agar bisa menarik investasi asing (investor asing) dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan proses perizinan, dan meningkatkan mutu tenaga kerja sehingga nilai penanaman modal asing (PMA) dapat semakin meningkat serta bisa mendorong PDRB di Provinsi Riau.
- Pemerintah wilayah diharapkan agar bisa menaikan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Riau melalui strategi menjaga stabilitas

ekonomi, politik serta keamanan dalam negeri, memperbaiki saran serta prasarana infrastruktur yang menunjang dan mempermudah peraturan untuk berinvestasi sehingga PDRB di Provinsi Riau dapat meningkat.

2. Pemerintah wilayah Provinsi Riau diharapkan agar bisa mengalokasikan belanja daerah secara profesional antara belanja rutin yang konsumtif dengan belanja pembangunan yang lebih berpihak pada kepentingan publik sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap PDRB Provinsi Riau.
3. Pemerintah daerah diharapkan agar bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan cara meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan bertujuan menambah kualitas tenaga kerja, memberikan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja sehingga output meningkat yang pada akhirnya dapat memicu PDRB di Provinsi Riau.
4. Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber daya lokal yang perlu ditingkatkan mutunya. Keadaan ini perlu dilakukan mengingat semakin ketatnya persaingan yang semakin mengglobal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas angkatan kerja yang tumbuh tiap tahun dengan cara pembekalan pendidikan serta pelatihan sehingga mampu bersaing dipasar dan juga sebagai upaya menarik pihak ketiga (investor) untuk datang ke daerah yang memiliki sumber daya manusia tinggi agar tertarik menanamkan modalnya guna kepentingan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolyn. 1997. Ekonomi Pembangunan. Edisi Ketiga. Penerbit BP STIE YPKN. Yogyakarta.
- Azwar, Saifudin. 2001. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- Boediono. 2001. Ekonomi Makro. Edisi Keempat. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- _____. 2013. Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro. Edisi Kedua. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Provinsi Riau.
- _____. 2019. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah. Provinsi Riau.
- Deddy, Rustiono. 2008. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi. UNDIP. Semarang.
- Fajriah, Arwiny. 2011. Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB. Skripsi. UNDIP. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2011. Aplikasi Analisis Multifariat dengan Program SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Jakarta.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. 2008. Hukum Investasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Irawan. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. ANDI. Jakarta.
- Jhingan, M.L. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Revormasi, Perencanaan Strategi dan Peluang. Erlangga. Jakarta.

- Nawari. 2010. Analisis Regresi Dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nicholson, w. 2002. Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya. Edisi Kedelapan. Erlangga. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2006. Akutansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Prasetyo, Eko. 2009. Fundamental Makro Ekonomi. Beta Offset. Yogyakarta.
- Ravi, Dwi Wijayanto. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. Skripsi. Semarang.
- Santoso. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2001. Perencanaan Pajak. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru Raja. Grafindo Pustaka. Jakarta.
- _____. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2005. Makro Ekonomi Teori. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2010. Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. ANDI. Jakarta.
- Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Salemba Empat Edisi Pertama.
- Suryono. 2010. Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah. FE Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro M.P. 2000. *Economic Development. Seven Edition*. New York. Addition Wesley Longman.Inc.

_____. 2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

_____. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (PERDA).

_____. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untari. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB di Kawasan SUBOSUKOWONOSRATEN. Skripsi. Jawa Tengah.

Untoro, Joko. 2010. Ekonomi. Kawahmedia. Jakarta.

